

**Sosialisasi Menjaga Netralitas Birokrasi Menjelang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Tahun 2024 di Kelurahan Brebes**

Titi Rahmawati¹, Khayu Rohmi², dan Thahrina Azriah³

^{1,2,3} Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

*Email corresponding: titi.rahmawati@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menghadapi dilema di mana tugas profesional mereka bertentangan dengan afiliasi politik atau harapan dari para elit politik. Kebutuhan akan birokrasi yang netral digarisbawahi oleh perannya dalam mendorong pemilu yang adil dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Tujuan sosialisasi ini ialah membangun sinergi antara ASN sebagai pilar pemerintahan dan masyarakat, memastikan bahwa pelayanan publik tetap adil dan transparan tanpa adanya friksi politik. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kelurahan Brebes dengan metode ceramah, diskusi dan evaluasi. Dengan mengikuti sosialisasi ini, tidak hanya meningkatkan pengetahuan ASN tentang peraturan yang berlaku tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional. Upaya berkelanjutan untuk mendidik dan memperkuat nilai-nilai ini di kalangan ASN Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes sangat penting untuk mencapai birokrasi yang kuat dan tidak memihak yang mampu melayani kepentingan publik secara efektif.

Kata kunci: ASN, Netralitas Birokrasi, Pemilu

ABSTRACT

State civil servants often face dilemmas where their professional duties conflict with the political affiliations or expectations of political elites. The need for a neutral bureaucracy is underscored by its role in promoting fair elections and maintaining public trust in government institutions. The purpose of this socialization is to build synergy between ASN as a pillar of government and society, ensuring that public services remain fair and transparent without political friction. This socialization activity was held at the Brebes Village Hall with lecture, discussion and evaluation methods. By participating in this socialization, it not only increases ASN's knowledge of applicable regulations but also contributes to the creation of a better and more professional bureaucratic environment. Continued efforts to educate and strengthen these values among the ASN of Brebes Village, Brebes Regency are essential to achieving a strong and impartial bureaucracy capable of effectively serving the public interest.

Keywords: State Civil Apparatus, Bureaucratic Neutrality, Election

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 tinggal menghitung bulan. Seperti pada pesta demokrasi sebelumnya, problematika netralitas birokrasi masih menjadi isu yang sulit dihindari. Kepentingan karir terkadang menjadikan ASN berada di posisi yang membingungkan. Tekanan politik dan kepentingan

yang mengakar terus mengancam netralitas birokrasi, terutama selama masa pemilihan umum. Studi menunjukkan bahwa aparatur sipil negara sering menghadapi dilema di mana tugas profesional mereka bertentangan dengan afiliasi politik atau harapan dari para elit politik (Tamma, 2016; Kamaludin, et al., 2024). Kebutuhan akan birokrasi yang netral digarisbawahi oleh perannya dalam mendorong pemilu yang adil dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk menjunjung tinggi netralitas ini, terutama selama pemilihan kepala daerah (Pilkada). Netralitas birokrasi adalah konsep penting dalam memastikan pemilu yang adil dan demokratis, terutama dalam konteks di Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, di mana dinamika politik dapat sangat mempengaruhi perilaku pegawai negeri sipil. Netralitas birokrasi mengacu pada kewajiban pegawai negeri sipil untuk tidak memihak dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat membahayakan tugas profesional mereka.

Sosialisasi menjaga netralitas birokrasi yang efektif sangat penting untuk memperkuat profesionalisme di kalangan pegawai negeri sipil. Hal ini melibatkan program pelatihan dan kesadaran yang menekankan pentingnya ketidakberpihakan dalam pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pegawai negeri sipil disosialisasikan secara memadai mengenai peran netral mereka, mereka lebih mungkin untuk menolak tekanan politik dan bertindak untuk kepentingan public (Tamma, 2016; Zuhro, 2021). Proses sosialisasi juga memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menanamkan pemahaman yang kuat tentang perilaku etis dan implikasi keberpihakan, birokrasi dapat mengurangi risiko yang terkait dengan korupsi dan nepotisme. Hal ini sangat penting dalam konteks di mana campur tangan politik lazim terjadi, karena hal ini membantu memastikan bahwa keputusan birokrasi dibuat berdasarkan kemampuan dan bukan loyalitas politik (Indiahono, 2022). Sosialisasi mengenai netralitas birokrasi juga membantu menciptakan budaya dalam administrasi publik yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Studi menyoroti bahwa ketika birokrasi berfungsi secara netral, mereka berkontribusi secara signifikan terhadap legitimasi proses demokrasi dengan memastikan praktik pemilu yang adil (Zuhro, 2021).

Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman bagi ASN untuk menjaga netralitas di lingkungan Kelurahan Brebes, Kab. Brebes yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai etika dan bentuk netralitas yang harus dilakukan oleh ASN, khususnya menjelang

Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antara ASN sebagai pilar pemerintahan dan masyarakat, memastikan bahwa pelayanan publik tetap adil dan transparan tanpa adanya friksi politik.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kelurahan Brebes pada Bulan September 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan Kerjasama pemerintah setempat, dalam kesempatan ini yaitu Lurah untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan ASN di lingkungan Kelurahan Brebes. Adapun tahap-tahap kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu:

1. Ceramah

Kegiatan ini dilakukan dengan memaparkan materi terkait dengan pentingnya menjaga netralitas ASN, khususnya menjelang pemilihan umum atau Pilkada.

2. Diskusi

Diskusi yang dilakukan berupaya tanya jawab antara peserta sosialisasi dengan pemateri. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap peserta.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana peserta mampu memahami materi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjelang pesta demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Brebes tahun 2024, Jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman menyelenggarakan Sosialisasi Netralitas Birokrasi Untuk Mensukseskan Pilkada Serentak yang integritas dan juga demokratis. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2024 pukul 09.00 WIB di Aula Kelurahan Brebes, Jl. Jenderal A. Yani No.15, RW.01, Brebes Tengah.



Gambar 1.
Dokumentasi Kegiatan

Sosialisasi disampaikan oleh perwakilan dosen Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman yang terdiri atas 3 (tiga) narasumber yaitu Titi Rahmawati, M.Si., Khayu Rohmi, MPA., dan Thahrina Azriah, M.Si. Tahapan sosialisasi terdiri atas 2 sesi, yaitu sesi pemberian materi dan juga sesi diskusi. Berikut tahapan sosialisasi yang dilakukan:

1. Penyampaian Materi

Terdapat 3 (tiga) materi atau 3 (tiga) sesi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini. Materi yang pertama disampaikan oleh Titi Rahmawati, M.Si. mengenai “Menjaga Kepercayaan Masyarakat dengan Netralitas”. Penyampaian materi ini berisikan penjelasan bahwa menjaga netralitas tidak hanya berfungsi untuk melindungi integritas institusi, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa ASN dan institusi pemerintah bertindak secara netral, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Ini sangat penting untuk legitimasi dan keberlangsungan demokrasi. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan diambil tanpa pengaruh politik, dapat menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Netralitas bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Materi yang kedua disampaikan oleh Khayu Rohmi, MPA mengenai “Hormati Netralitas ASN dengan Mengedepankan Etika”. Materi ini menjelaskan bahwa mengedepankan etika bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan penegakan aturan yang telah ditetapkan. ASN diwajibkan untuk mengikuti kode etik yang

mencakup 1) Etika Bernegara: ASN harus melaksanakan tugas dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dan 2) Etika Terhadap Sesama ASN: Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama ASN serta menghormati perbedaan pendapat.

Materi yang ketiga atau terakhir disampaikan oleh Tharina Azriah, M.Si. mengenai “Netralitas sebagai Komitmen Bersama Birokrasi selama Pemilu”. Materi yang disampaikan berupa gambaran beberapa tantangan dalam netralitas birokrasi, dimana pelanggaran terhadap netralitas sering kali terjadi karena tekanan politik atau keinginan untuk mempertahankan jabatan. Data menunjukkan bahwa selama Pilkada 2020, terdapat banyak kasus pelanggaran netralitas oleh ASN. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum. Dampak-dampak tersebut antara lain: diskriminasi layanan publik, kehilangan legitimasi, kualitas pemilihan menurun, konflik kepentingan, menurunnya profesionalisme dan distorsi kepentingan publik.

2. Diskusi

Pada sesi atau tahapan ini, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan proses tanya jawab. Dalam proses tanya jawab ini, jumlah penanya tidak dibatasi. Artinya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk bertanya. Tujuannya ialah agar peserta betul-betul memahami materi dengan baik dan menjadi ASN yang benar-benar netral. Selama proses diskusi berlangsung, terdapat 6 (enam) orang penanya. Pertanyaan yang disampaikan pun beragam. Seperti upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi adanya intervensi politik, hingga bagaimana menanggapi isu-isu politik yang banyak beredar di media sosial. Hal ini menunjukkan antusiasme peserta terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Pada tahap akhir, penulis memastikan bahwa seluruh peserta telah memahami materi dengan baik karena keseluruhan pertanyaan telah terjawab.

Setelah mengikuti rangkaian sosialisasi mengenai netralitas birokrasi ini, peserta memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran

Memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya netralitas ASN, terutama menjelang tahun politik. Hal ini membantu ASN memahami peraturan dan tanggungjawab mereka dalam menjaga netralitas. Kemudian ASN diingatkan tentang peran mereka

sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan masyarakat, yang harus bebas dari intervensi politik.

2. Pengurangan Pelanggaran

Dengan adanya sosialisasi, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran netralitas di kalangan ASN, yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman atau kesadaran. Sosialisasi juga mencakup informasi tentang konsekuensi dari pelanggaran, termasuk sanksi yang dapat dikenakan, sehingga mendorong ASN untuk lebih patuh.

3. Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas

ASN dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada semua lapisan masyarakat tanpa memihak pada kelompok tertentu. Netralitas ASN berkontribusi pada terciptanya birokrasi yang bersih dan efektif, serta mendukung prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan

4. Sinergi dan Kerjasama

Setelah mengikuti sosialisasi, semangat peserta dalam membangun sinergi antara berbagai instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN semakin meningkat. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap netralitas.

Dengan mengikuti sosialisasi ini, ASN tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan yang berlaku tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi netralitas birokrasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong administrasi publik yang efektif dan akuntabel. Mempertahankan sikap netral dalam birokrasi tidak hanya meningkatkan profesionalisme, tetapi juga melindungi dari penyalahgunaan politik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. Upaya berkelanjutan untuk mendidik dan memperkuat nilai-nilai ini di kalangan pegawai negeri sipil Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes sangat penting untuk mencapai birokrasi yang kuat dan tidak memihak yang mampu melayani kepentingan publik secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, Dwiyanto. (2022). Dynamics of Bureaucratic Neutrality Policy in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(3), 309-320. <https://doi.org/10.2428/jba.v18i3.1104>
- Kamaluddin, K., Haeril, H., & Hidayatullah, A. (2024). The Challenge of Bureaucratic Neutrality in the 2024 Legislative and Presidential Elections in Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 135-148. <https://doi.org/10.35326/jsip.v5i1.5123>
- Tamma, S. (2016). Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1(2), 95-112. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.69>
- Zuhro, R. S. (2021). The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 3(2), 63-75. <https://doi.org/10.54268/baskara.v3i2.8717>